

BKSDM Pastikan Kota Bandung Sudah Tidak Ada Honorer

Category: Daerah

6 Februari 2026

BANDUNG, Prolite – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Evi Hendari memastikan di Kota Bandung sudah tidak ada tenaga honorer. Sesuai undang-undang tahun 2023 bahwa tidak diperbolehkan ada pengangkatan tenaga kerja.

“Bawa kita mengikuti ketentuan undang-undang no 20 tahun 2023, tidak ada lagi pengangkatan tenaga yang mengerjakan pekerjaan ASN, karena itu amanat undang-undang,” tegas Evi di Balai Kota.

Saat ini jumlah pegawai pemerintah kata Evi, ada sekitar 23 ribu terdiri dari 10 ribu PNS, 5 ribu P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), kemudian sekitar P3K paruh Waktu.

“Otomatis sebenarnya tidak ada lagi honorer kecuali kalau memang seperti yang dilaksanakan oleh DLH petugas Gaslah. Kalau itu tidak salah karena peruntukan tanyakan langsung ke dinas karena itu kebutuhan masing-masing,” ucapnya lagi.

Untuk pengangkatan tenaga P3K dari SPPG Makan Gizi Gratis kata Evi bukan ranahnya melainkan langsung oleh pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekali lagi Evi menyampaikan saat ini komposisinya adalah PNS, P3K, P3K paruh Waktu, BLUD, dan outsourcing untuk tenaga-tenaga teknikal, seperti satpam, driver, dan pramusaji yang direkrut pemerintah dari yayasan.

“Kalau tenaga guru tanyakan ke disdik,” pinta Evi.

400 Guru AKPK Diangkat Demi Tingkatkan Ilmu Keagamaan di Sekolah

Category: Daerah
6 Februari 2026



Pemerintah Kabupaten Purwakarta Angkat 400 Guru AKPK

PURWAKARTA, Prolite – Karena Pendidikan Agama hanya tiga jam dalam satu minggu, Pemkab Purwakarta mengangkat 400 guru AKPK (Agama Keagamaan dan Pendalaman Kitab) dari tenaga honorer.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Sadiyah menyampaikan bahwa program AKPK ini bagi pemerintah Daerah

sangat penting.

“Pendidikan agama tidak cukup tiga jam oleh karenanya pemerintah kabupaten mengangkat hampir 400 guru AKPK guru agama dan pendalaman kitab-kitab. Jadi ada guru sesuai agamanya masing-masing misal untuk murid beragama Islam diajar oleh guru agama Islam, atau agama Kristen dan agama lainnya,” ujar Sadiyah ditemui di ruang Sekda Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu.

Untuk pendalaman kitab-kitab semisal kitab kuning biasanya diberikan pada siwa kelas tinggi, dan untuk yang beragama Kristen diberikan kepada anak-anak beragama Kristen yang ingin pendalaman pada kitab Injil.

Kata Sadiyah, pengangkatan guru tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Purwakarta dan itu dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah.

“Ya yang pendalaman kitab berbeda, misal kalau ada 10 anak di sekolah yang ada agama lain pasti disiapkan juga guru APKP-nya dan itu digaji bukan dari pusat tapi dari anggaran pemerintah daerah,” tandasnya.

Namun kata Sadiyah, penerapan AKPK ini belum dilakukan di semua sekolah negeri karena keterbatasan anggaran, sehingga untuk sekolah negeri baru diterapkan di 75 sekolah.

Sedang untuk sekolah swasta sudah ada 112 sekolah. Hal itu karena waktu pendalaman agama dan kitab di sekolah swasta lebih panjang apalagi banyak sekolah swasta yang berbasis Islam atau Kristen.

“Pendidikan agama ini dalam kurikulum nanti di sisipkan modul pembelajarannya insersi ke dalam kurikulum yang diajarkan misalnya gini,” tuturnya.

Masih kata Sadiyah, selain sekolah biasa. Pemkab Purwakarta pun memberi keberpihakan pendidikan bagi siswa penyandang

disabilitas dengan mengembangkan pendidikan berbasis inklusi.

Bagi sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, maka pihaknya bekerjasama koordinasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB).

"Tidak semua sekolah punya guru BK atau basic sekolah luar biasa. Di tahun 2022, kita kerjasama kordinasi agar mengetahui bagaimana menghadapi anak inklusi. Karena anak ini tidak bisa disamakan dengan anak biasa," paparnya.

Sedari awal pada saat assessment ketika masuk diketahui apa kebutuhannya, semisal bagi tuna netra, tuna rungu, grahita atau anak disabilitas lainnya.

"Saat menentukan KKM misal 8, anak inklusi tidak segitu karena hidup sosialisasi dengan teman diterima dan mampu berdiri sendiri untuk bekal di masyarakat kelak itu dianggap sudah capai KKM bagi mereka, intinya kita tidak membedakan dan mereka berhak mendapat pendidikan. Sehingga keluarga tidak mengurung dirumah atau disembunyikan atau tidak bergaul, anak-anak ini harus dibantu," tutupnya.

Resmi Kenaikan Gaji Tenaga Honorer 2024 Disetujui Menteri Keuangan, Simak Nominal Kota Bandung

Category: Daerah
6 Februari 2026



Resmi Kenaikan Gaji Tenaga Honorer 2024 Disetujui Menteri Keuangan, Simak Nominal Kota Bandung

Prolite – Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menyetujui kenaikan gaji tenaga honorer pada tahun 2024 mendatang.

Besaran gaji tahun 2024 yang sudah di ajukan ke Menteri Keuangan sudah di setujui oleh Sri Mulyani.

Berita bahagia itu memang sudah di nanti-nantikan oleh seluruh tenaga yang bekerja pada perusahaan di Kota Bandung.

Untuk nominal besaran kenaikan gaji honor di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing daerahnya.

Gaji Tenaga Honorer terbaru telah diatur dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023.

PMK tersebut mengatur tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Salah satunya yaitu pengeturan gaji untuk

seluruh tenaga honores di setiap provinsi di Indonesia.

Kategori perbaikan kenaikan gaji untuk tenaga honorer tersebut diantaranya satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti.

Lalu berapa besaran gaji yang diterima tenaga honorer di Kota Bandung , Jawa Barat tahun 2024?

1. Satpam:
2. Pengemudi:
3. Petugas Kebersihan:
4. Pramubakti:

Itulah nominal gaji tenaga honorer di Kota Bandung yang akan diterima tahun 2024 mendatang.

Dengan di resmikan dan di sahkannya RUU ASN pada Oktober lalu maka ini menjadi angina segar bagi kegelisahan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi bertahun-hanun di perusahaan tersebut.